

Pelaksanaan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Nur Haslinda¹ Lilis Suryani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,
Jl. Kaharuddin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: nurhaslinda@student.uir.ac.id lilissuryani@soc.uir.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation and inhibiting factors of the Protection and Social Security Program for Abandoned Children by the Pekanbaru City Social Service. The method used is qualitative descriptive by determining several informants as data sources. Data collection was carried out by means of interviews, observations, and documentation. All data collected was separated and analyzed one by one to be able to draw descriptive conclusions. The results of this study concluded that the implementation of the protection and social security program for abandoned children by the Pekanbaru City Social Service had been running. Indicator of the program implementation process, it was found that routine and consistent protection and social security activities were carried out by the Pekanbaru City Social Service in rehabilitating existing abandoned children. The indicator of the policy objectives was found in implementing the protection and social security program had been implemented, so that the targeted abandoned children who received this program received changes in morals, socially, and spiritually. Meanwhile, the obstacles encountered are budget limitations, lack of trained or competent human resources, lack of training facilities and resources, lack of community support and participation.

Keywords: *Implementation, Program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan faktor penghambat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menetapkan beberapa orang informan sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dipisahkan dan dianalisis satu persatu untuk dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berjalan. Indikator proses pelaksanaan program ditemukan bahwa kegiatan perlindungan dan jaminan sosial rutin dan konsisten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak terlantar yang ada. Indikator tujuan kebijakan ditemukan dalam melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial sudah terlaksana, sehingga anak terlantar yang ditargetkan dan memperoleh program ini mendapatkan perubahan baik moral, sosial, dan spiritual. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM terlatih atau kompeten, kurangnya fasilitas dan sarana pelatihan, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan Perlindungan dan jaminan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan dan peningkatan pemberdayaan melalui penerapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. Pembangunan kesejahteraan ini bisa didapatkan dengan memperbaiki ataupun merumuskan kebijakan dan program yang tepat bagi masyarakat yang kurang beruntung maupun rentan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan peningkatan derajat hidup yang lebih tinggi.

Kebijakan maupun program yang tepat sasaran dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat harus di barengi dengan upaya yang di lakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat, dalam menentukan kebijakan seluruh proses pembentukan agar nantinya bisa diimplementasikan di dalam masyarakat, proses pembentukan kebijakan harus diuraikan secara tepat dengan melakukan penyusunan agenda yang dilakukan untuk menetapkan kebijakan publik yang tepat dan berlaku bagi masyarakat, melakukan tahap formulasi dengan melihat dan menyadari masalah penting dalam lingkungan masyarakat dengan pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab melegitimasi langsung atas jalannya proses dalam menetapkan kebijakan, tahap implementasi sebagai tahap lanjutan dalam menentukan kebijakan setelah itu dilanjutkan pada tahap evaluasi kebijakan di mana dalam tahap ini kebijakan yang sudah diimplementasikan diawasi dan dievaluasi.

Masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu momok yang hingga sampai hari ini ada dan belum terselesaikan didaerah daerah yang tinggi penduduk. Masalah kesejahteraan terjadi karena masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan wajar karena miskin, terlantar dan cacat. Untuk mengentaskan kesejahteraan sosial yang ada di dalam masyarakat pemerintah memberikan solusi dengan merumuskan kebijakan mengenai masalah kesejahteraan sosial melalui Permensos No 8 Tahun 2012. Masyarakat yang terdata akan dikelompokkan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dinas Sosial Kota Pekanbaru melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan pendataan dan penjangkauan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dari data yang diperoleh diketahui di Kota Pekanbaru terdapat banyak anak yang memperoleh perhatian atau bantuan dari pemerintah, sehingga layak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial. Di ketahui bahwa terdapat 9 jenis permasalahan mengenai anak yang ditangani oleh Dinas Sosial yang salah satunya adalah anak terlantar. Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif (peningkatan dan penurunan),

sehingga dibutuhkan konsistensi program kerja yang mampu memberikan dukungan sosial kepada anak terlantar agar memperoleh kehidupan yang layak.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar dalam Pasal 4 disebutkan kriteria Anak Terlantar terdiri atas:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- d. Masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Upaya penyelesaian masalah kesenjangan sosial ini memang sangat kompleks dalam penyelesaiannya, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan masalah mengenai terpenuhinya kebutuhan anak terlantar, baik dari segi pendidikan maupun keberlangsungan hidup karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan merumuskan program program yang disusun oleh pemerintah mengenai pengentasan kesenjangan sosial di masyarakat, terlebih mengenai penanganan kesejahteraan anak terlantar. Salah satunya yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar masalah seperti anak terlantar bisa diatasi sehingga mampu membawa perubahan di masa depan.

Untuk mengatasi dan menangani masalah kesejahteraan sosial terutama pada anak terlantar, maka Dinas Sosial telah merumuskan dan membuat program rehabilitasi sosial yakni: penjangkauan anak terlantar, rujukan anak terlantar, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.

Perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah disusun dan dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 terlihat bahwa terdapat 3 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani masalah anak terlantar. Di mana kegiatan tersebut berupa penjangkauan, rujukan, pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar dengan jumlah yang menjadi sasarannya sangat sedikit yakni 10-15 orang setiap tahunnya.

Program perlindungan dan jaminan sosial dalam kegiatan pemeliharaan anak terlantar terdapat 3 sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2023-2024 belum berjalan maksimal. Tahun 2023 jumlah kegiatan yang dilaksanakan hanya 2 dengan anak terlantar yang dijangkau hanya 10-13 orang, sehingga dapat dinyatakan tidak sesuai target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2024 hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan dari 3 kegiatan yang ditetapkan dengan jumlah anak terlantar yang mampu dijangkau hanya 8 orang, sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 penjangkauan anak terlantar jauh dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan pra survey yang diperoleh di lapangan, terlihat beberapa indikasi yang menggambarkan kurang maksimalnya pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan sebagai berikut :

1. Program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar ditetapkan dan dilaksanakan hanya 3 jenis kegiatan yakni penjangkauan, rujukan, dan pemeliharaan. Namun pada faktanya dalam 2 tahun terakhir hanya kegiatan rujukan yang rutin atau konsisten dilaksanakan.
2. Tidak tercapainya target dalam penjangkau anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru untuk pendataan dan diperlihara, sehingga kemampuan yang ditetapkan hanya 10-15 orang anak terlantar setiap tahunnya.
3. Masih terlihat anak terlantar yang ditemui berada dijalan sedang mengamen, mengemis, berjualan, dan sebagainya di beberapa titik jalan Kota Pekanbaru dengan kondisi yang tidak terawat atau terurus. Hal ini mengindikasikan bahwa penjangkauan anak terlantar belum maksimal dilaksanakan Dinas Sosial.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2017:68) Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Westra dalam Adisasmita (2014:12) menyatakan pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Abdullah (2014:151) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dengan demikian pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Menurut Wahab (2017:65) pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Harsono (2012:67) menyatakan Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut Tjilen (2019) implementasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan dengan sifat interaktif dengan demikian terkait juga dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan pada implementasinya. Pendapat selanjutnya menurut Dunn dalam Tjilen (2019), implementasi kebijakan yaitu aktivitas untuk melaksanakan kebijakan, biasanya berisi implementasi berbagai program dan didalamnya sering terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks dan memerlukan tindakan bersama.

Pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Grindle dalam Agustino (2018:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yang tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertahanya apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*desing*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Dengan demikian, maka peneliti menetapkan pendapat Grindle dijadikan sebagai indikator penelitian yakni proses dan tujuan kebijakan. Kedua indikator ini saling berkaitan, sehingga dengan melihat dari proses yang merupakan aksi nyata kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan diharapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak terlantar di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial.

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones dalam Abidin (2020:25) mendefinisikan kebijakan yaitu: Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu

bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.

Menurut Abidin (2020: 25) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penggunaan tipe ini bertujuan menghimpun fakta-fakta yang ada pada Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kerja tersebut, serta upaya menangani hambatan yang ditemukan.

Untuk mengumpulkan data maka ditetapkan key informan dan informan dalam memperoleh berbagai informasi guna menjawab permasalahan yang diteliti. Key Informan dalam penelitian ini Kepala Dinas Sosial. Informan pada penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Terlantar, Staf Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, serta Ketua RW/RT di Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dipisahkan sesuai kriterianya masing-masing, lalu dianalisis secara mendalam untuk ditetapkan kesimpulan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan faktor penghambat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Di mana program kerja perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar merupakan kewenangan Dinas Sosial dalam hal mensejahterakan masyarakat Kota Pekanbaru dan juga menjaga ketertiban dan ketenteraman hidup di masyarakat.

1. Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Indikator pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dirumuskan Grindle, yakni: Proses pelaksanaan program, dan tujuan kebijakan.

a. Proses Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program menurut Kogoya, dkk (2020) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru membutuhkan proses yang tidak singkat berupa penetapan program, konsistensi, dan jenis kegiatan yang tepat sasaran. Proses pelaksanaan program ini perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memelihara anak-anak terlantar agar mendapatkan kehidupan yang layak.

1) Kejelasan program kerja (maksud dan tujuan, sasaran)

Program kerja yang direncanakan dan akan dilaksanakan dibutuhkan kejelasan maksud, tujuan, dan sasarannya. Hal ini perlu dilakukan agar program kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan terukur, sehingga permasalahan yang ingin dituntaskan menjadi tepat sasaran.

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai apa tujuan dari pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar di Kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa

Untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layaknya anak-anak di usianya. Terutama anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga atau lingkungan (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru di atas memberikan keterangan bahwa tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial ini untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan

untuk tumbuh dan berkembang secara layaknya anak-anak diusianya. Terutama anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga atau lingkungan.

Wawancara dengan Ibu Suci Yusmaila, S.STP selaku Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang maksud dan tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar yakni

Untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak terlantar melalui pelayanan, memenuhi kebutuhan dasar anak. Program ini pun sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi anak terlantar (Wawancara pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial di atas memberikan penjelasan bahwa maksud dan tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar ini untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak terlantar melalui pelayanan, memenuhi kebutuhan dasar anak. Program ini pun sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi anak terlantar.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai apa maksud dan tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar yakni:

Bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak terlantar, melindungi anak dari resiko eksploitasi kekerasan dan penelantaran, serta mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di atas memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak terlantar, melindungi anak dari risiko eksploitasi kekerasan dan penelantaran, serta mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan.

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai maksud dan tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar, yakni:

Untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Terutama bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari keluarga atau lingkungan sekitarnya (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak di atas menerangkan maksud dan tujuan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar merupakan bentuk perlindungan hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Terutama bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Program ini merupakan tanggung jawab negara dalam mengambil alih fungsi dan membantu keluarga dalam memberikan hak yang layak pada anak.

Wawancara dengan Bapak M. Sofi'i selaku Ketua RT 05 RW VI Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru memberikan pandangan tentang program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan Dinsos Pekanbaru, yakni:

Pandangan mengenai program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar sangat mendukung terhadap program pemerintah ini. Masyarakat pun secara sukarela mau membantu dan memberikan bantuan bila dibutuhkan pemerintah (Wawancara pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 17.00 Wib bertempat di Kediaman Ketua RT 05 RW VI Kelurahan Simpang Tiga).

Tanggapan yang disampaikan Ketua RT yang di mana salah seorang warganya merupakan anak terlantar yang telah mendapat pemeliharaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab bersama baik itu pemerintah maupun masyarakat, sehingga anak terlantar mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan Ibu Mardiani, S.Pd selaku Ketua RW 02 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru memberikan pandangan mengenai program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan Dinsos Pekanbaru, yakni:

Program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejauh ini sangat membantu masyarakat yang melaporkan tentang adanya anak terlantar, mereka juga tanggap, sehingga mendukung terhadap program pemerintah ini (Wawancara pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Ketua RW 02 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan).

Tanggapan yang disampaikan ketua RW yang diwilayahnya terdapat anak terlantar yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah dari program perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Di mana tanggapan yang disampaikan menerangkan bahwa program ini sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah anak terlantar, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga sehingga anak memperoleh penghidupan yang layak. Pemeliharaan anak terlantar ini merupakan tanggung jawab bersama baik itu negara maupun masyarakat, sehingga dengan bahu membahu diharapkan anak terlantar dapat penghidupan yang layak sebagaimana anak-anak yang lainnya.

Observasi yang peneliti lakukan terhadap dokumen-dokumen Renstra maupun Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru didalamnya jelas tertuang salah satu program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar. Di mana dalam program tersebut disebutkan maksud dan tujuannya untuk memberikan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan UUD 1945 bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara. Untuk melaksanakan program ini Dinas Sosial telah menetapkan 3 (tiga) jenis kegiatan yakni penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap anak terlantar.

Berdasarkan tanggapan dan observasi di atas dapat dikatakan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial merupakan suatu program yang telah ditetapkan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Di mana maksud dan tujuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak terlantar agar memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana anak seusianya. Selain itu program ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara terutama anak-anak yang terlantar agar memperoleh kehidupan yang layak.

2) Konsistensi program kerja

Konsistensi program kerja mengacu pada keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari sebuah program. Ini berarti bahwa program kerja harus dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, dengan target dan indikator yang jelas, serta menghasilkan capaian yang sesuai dengan yang telah ditetapkan

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang menjaga konsistensi kerja dari program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dalam beberapa tahun terakhir ini diperoleh informasi bahwa:

Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan Kepala Dinas Sosial dapat dijelaskan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. Terutama pada tahun-tahun terakhir ini program ini berjalan semakin positif dan banyak memberikan manfaat bagi anak terlantar, sehingga mendapatkan penghidupan yang layak.

Wawancara dengan Ibu Suci Yusmaila, S.STP selaku Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang konsistensi kerja dari program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini yakni:

Dinas Sosial telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan program ini melalui berbagai kegiatan. Namun, untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas program diperlukan terlebih dahulu peningkatan sumber daya, koordinasi yang baik antar instansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak (Wawancara pada hari Selasa tanggal 3

Juni 2025 pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Sosial menerangkan bahwa Dinas Sosial telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar melalui kegiatan penjangkauan, pendataan, dan pemeliharaan. Namun, untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas program diperlukan terlebih dahulu peningkatan sumber daya, koordinasi yang baik antar instansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang menjaga konsistensi kerja dari program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni:

Konsistensi kerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan pada beberapa tahun ini, yakni:

Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak menerangkan bahwa konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Di mana setiap tahunnya terdapat berbagai kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak H. Amir Husin, ST selaku staf Bidang PDJS Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan pada beberapa tahun ini, menyatakan:

Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Dinas Sosial berusaha meningkatkan konsistensi dan efektivitas dalam menjalankan program ini (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Staff PDJS di atas menerangkan bahwa Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Dinas Sosial berusaha meningkatkan konsistensi dan efektivitas dalam menjalankan program ini, sehingga setiap tahunnya terdapat anak terlantar yang dipelihara dan diupayakan memperoleh penghidupan yang layak.

Observasi yang peneliti lakukan terlihat jelas bahwa program perlindungan dan jaminan sosial ini senantiasa terus dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Di mana setiap tahunnya Dinas Sosial mengadakan berbagai kegiatan untuk melakukan penjangkauan, pendataan, dan pemeliharaan anak terlantar, sehingga anak terlantar mendapatkan penghidupan yang layak. Sebagaimana peneliti perhatikan pada saat dilapangan dengan mengunjungi Selter Dinas Sosial Kota Pekanbaru baru saja menyelesaikan kegiatan pemeliharaan terhadap beberapa anak terlantar sebelum dikembalikan pada keluarga dan masyarakat tempat mereka berada.

Berdasarkan hasil tanggapan dan observasi yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial sangat konsisten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Konsistensi ini terlihat dalam beberapa tahun terakhir banyak anak terlantar yang dapat dijangkau, didata, dan dipelihara serta direkomendasikan untuk memperoleh pelatihan dari Dinas Sosial Provinsi Riau.

3) Jenis-jenis kegiatan

Jenis kegiatan secara umum bisa merujuk pada berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan dan saling berkesinambungan. Salah satu jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam merehabilitasi anak terlantar melalui program perlindungan dan jaminan sosial.

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar diperoleh informasi bahwa:

Memberikan pembinaan, edukasi, dan pemahaman mengenai masa depan anak (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah memberikan pembinaan, edukasi, dan pemahaman kepada anak terlantar, sehingga anak terlantar dapat menjalani hidup dengan baik. perlindungan yang diberikan dengan membuat identitas bagi anak yang tidak memiliki identitas dan mengembalikan anak yang masih punya keluarga serta merekomendasikan pemeliharaan anak kepanti-panti bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai

apasaja jenis kegiatan yang ditetapkan dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Memberikan pembinaan, memberi edukasi, memberi pemahaman memenuhi kebutuhan dasar (makan 3 kali sehari), melaksanakan kegiatan rutin harian (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa anak terlantar yang diberikan perlindungan oleh dinas dilakukan dengan memberikan pembinaan, memberi edukasi, memberi pemahaman memenuhi kebutuhan dasar (makan 3 kali sehari), melaksanakan kegiatan rutin harian. Kemudian semua anak terlantar yang telah didata dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari identitas sampai kepada keluarga yang bisa ditemui.

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai jenis kegiatan yang laksanakan dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Penjangkauan, layanan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial anak, reintegrasi sosial dan reunifikasi keluarga (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dimulai dari melakukan survey lapangan melihat langsung kondisi anak terlantar dan melakukan pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar anak, pembinaan, melakukan mediasi, kegiatan edukasi dan memberikan pemahaman kepada anak serta keluarganya.

Hasil observasi penelitian atas kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial pada anak terlantar dilaksanakan pada tepatnya pada Selter yang telah disiapkan di Jalan Abidin Kota Pekanbaru. Sementara kegiatan lainnya seperti penjangkauan dan pendataan kurang dominan dilaksanakan, dikarenakan kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti tenaga penyuluh, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan di atas maka dapat dikatakan bahwa kegiatan perlindungan dan jaminan sosial rutin dan konsisten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak terlantar yang ada.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan adalah berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, baik itu dalam konteks organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat luas. Tujuan kebijakan dalam penelitian ini adalah rehabilitasi sosial melalui program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial.

1) Target sasaran

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai targetkan dalam program perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak terlantar diperoleh informasi bahwa:

Tidak memiliki target tapi biasanya ada di sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan para informan di atas menerangkan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial tidak memiliki target tapi biasanya ada di sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya. Pemenuhan hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif, untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai targetkan dalam program perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak terlantar, yakni

Pemenuhan hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif, untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan para informan di atas menerangkan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial tidak memiliki target tapi biasanya ada di sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya. Pemenuhan hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif, untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai targetkan dalam program perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Targetnya anak-anak terlantar sering tidak memiliki KTP/Akta Kelahiran, sehingga bantuan sosial tidak selalu tepat sasaran (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan para informan di atas menerangkan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial tidak memiliki target tapi biasanya ada di sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya. Pemenuhan hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif, untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia.

Hasil pengamatan lapangan melalui penelusuran dokumen Renstra Dinas Sosial 2021-2026 telah ditetapkan target tahunan untuk pemeliharaan anak

terlantar, ada 10 anak terlantar ditargetkan setiap tahunnya mendapatkan layanan pemeliharaan. Faktanya jumlah yang dipelihara setiap tahunnya lebih dari target yang ditetapkan. Penetapan target ini sebagai indikasi kinerja saja, dikarenakan faktanya jumlah anak yang dilayani melebihi dari jumlah yang ada dalam Resntra maupun Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dengan demikian jelaslah bahwa anak terlantar menjadi target dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial, sehingga setiap tahunnya dilakukan pendataan, penjangkauan, dan pemeliharaan agar anak terlantar mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya.

2) Dampak pada sasaran program

Setiap program memiliki dampak yang hendak disasar atas sasaran yang menjadi tujuannya. Untuk itu dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak terlantar, dinas sosial menetapkan sasaran atas program tersebut adalah anak terpelihara oleh negara.

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai dampak dalam pelaksanaan program jaminan dan perlindungan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar diperoleh informasi bahwa:

Terpenuhinya kebutuhan dasar anak, pemulihan kondisi psikologis dan emosional, peningkatan akses pendidikan dan pembinaan, pengurangan angka anak terlantar, terciptanya lingkungan sosial yang eksklusif dan peduli anak (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial anak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, pemulihan kondisi psikologis dan emosional, peningkatan akses pendidikan dan pembinaan, pengurangan angka anak terlantar, terciptanya lingkungan sosial yang eksklusif dan peduli anak.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai dampak yang dicapai dalam pelaksanaan program jaminan dan perlindungan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Anak terlantar memperoleh akses terhadap pakaian, papan, sandang, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak. Penurunan jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun di Kota Pekanbaru (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial anak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, pemulihan kondisi psikologis dan emosional, peningkatan akses pendidikan dan pembinaan, pengurangan angka anak terlantar, terciptanya lingkungan sosial yang eksklusif dan peduli anak.

Hasil wawancara dengan beberapa orang telantar di Kota Pekanbaru yakni Gio, Rama Hendra Lesmana, M. Sobri Riski, dan Wahyu Saputra menyatakan bahwa:

Mereka pernah mendapatkan pendataan, pemeliharaan, dari Dinsos Pekanbaru selama 1-7 hari. Jenis kegiatan yang anda terima selama masa pemeliharaan yakni diberi bimbingan belajar, bimbingan keagamaan, kegiatan keterampilan, kegiatan sosialisasi, di edukasi, dan diberi pemahaman. Aktivitas mereka melakukan seperti biasa, mengembangkan diri dan aktivitas sosial serta pendampingan untuk kembali ke keluarga asal, dan pengurusan identitas diri. Setelah keluar dari tempat pemeliharaan mereka melakukan aktivitas rutin dan bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya serta ada yang melanjutkan sekolah dan meningkatkan keahlian sebagai bekal menjalani kehidupan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 13.00 – 15.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru)

Tanggapan yang disampaikan dari beberapa orang anak terlantar menerangkan bahwa mereka sangat senang dengan perhatian yang diberikan pemerintah, sehingga mereka merasa mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk masa mendatang. Setelah keluar dari rehabilitasi sosial mereka kembali kelingkungan keluarga dan masyarakat dengan menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Namun ada juga anak terlantar yang kembali kelingkungan seperti jalanan dan sebagainya, dikarenakan kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat sekitar.

Hasil observasi yang peneliti telusuri terhadap anak terlantar yang pernah mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari dinas kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Hal ini diperlihatkan anak sudah terlihat lebih bersih dan ada yang mengasuhnya, walaupun masalah pendidikan masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Namun secara sosial anak telah memperoleh kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam segi dampak yang dihasilkan dari program ini ada perubahan pada anak terlantar yang telah mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan kepada anak terlantar bisa berdampak positif untuk masa depan anak.

3) Tingkat perubahan pada sasaran program

Tingkat perubahan pada sasaran program merupakan perubahan yang terjadi pada anak terlantar dengan membandingkan setelah memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan sebelumnya. Untuk itu diperoleh informasi mengenai hal ini sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai upaya kedepannya untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa:

Memberikan bantuan sosial bersyarat dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan pemeliharaan anak terlantar (Wawancara

pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan bahwa upaya kedepannya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengurangi anak terlantar adalah dengan memberikan bantuan sosial bersyarat dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan pemeliharaan anak terlantar, lebih tegas meningkatkan kapasitas panti asuhan, meningkatkan forum anak dan forum komunikasi perlindungan anak, pelatihan rutin untuk SDM

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai upaya kedepannya untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru, yakni:

Peningkatan ekonomi keluarga melalui program bantuan sosial, menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, pendataan dan penjangkauan anak-anak terlantar, penindakan tegas terhadap orang tua (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan bahwa upaya kedepannya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengurangi anak terlantar adalah dengan memberikan bantuan sosial bersyarat dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan pemeliharaan anak terlantar, lebih tegas meningkatkan kapasitas panti asuhan, meningkatkan forum anak dan forum komunikasi perlindungan anak, pelatihan rutin untuk SDM

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai upaya kedepannya untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru, yakni:

Memberikan bantuan sosial, penegakan hukum terhadap eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan bahwa upaya kedepannya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengurangi anak terlantar adalah dengan memberikan bantuan sosial bersyarat dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan pemeliharaan anak terlantar, lebih tegas meningkatkan kapasitas panti asuhan, meningkatkan forum anak dan forum komunikasi perlindungan anak, pelatihan rutin untuk SDM Dinas Sosial dalam penanganan anak berisiko tinggi, menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, pendataan dan penjangkauan anak-anak terlantar, penindakan tegas terhadap orang tua

Observasi yang peneliti lakukan terhadap anak terlantar yang pernah memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terlihat sudah ada perubahan dalam dirinya dari sebelum memperoleh

program tersebut seperti penjangkauan dan pemeliharaan. Di mana perubahan tersebut terlihat ada anak yang sebelumnya putus sekolah, saat ini sudah mulai kembali ke sekolah. Ada juga anak terlantar yang sebelumnya tidak bisa mandiri dan hidup sehat, sekarang terlihat sudah mampu merawat dirinya dan hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial secara umum berjalan sebagaimana diharapkan. Namun kegiatan tersebut mendapatkan berbagai rintangan dan halangan seperti anggaran dan sebagainya. Namun apresiasi dari masyarakat terus berdatangan salah satunya dengan memberikan kritik untuk membangun kearah yang lebih baik pada masa mendatang. Di mana fasilitas dan SDM masih terbatas, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kategori anak yang dikatakan terlantar. Saran: peningkatan anggaran dan profesionalisme SDM, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada indikator tujuan kebijakan dalam melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial sudah terlaksana sebagaimana diharapkan oleh Dinas Sosial. Dimana anak-anak terlantar mendapat hak hidup yang layak sebagaimana mestinya.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar yang dijalankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak luput dari hambatan atau rintangan. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni:

1. Keterbatasan Anggaran

Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru setiap tahunnya telah dialokasikan sejumlah dana anggaran. Anggaran yang disediakan kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang mencakup penjangkauan, rujukan, dan pemantauan. Anggaran dana yang dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.063.000,- untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar. Jumlah dana yang sebesar ini tidak mampu melaksanakan seluruh kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, dana ini hanya dimanfaatkan Dinas Sosial untuk melakukan kegiatan rujukan anak terlantar.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia yang di tempat pada Dinas Sosial dari jumlahnya hanya 33 orang dan dibantu 18 orang THL. Sedangkan kualitas sumber daya manusia berasal dari luar Dinas Sosial seperti tenaga pendamping yang kurang terlatih dalam melakukan penjangkauan anak terlantar, sehingga data mengenai anak terlantar tidak ada yang valid dan dapat dijadikan patokan untuk masa mendatang.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar membutuhkan sarana dan prasarana pendukung atau penunjang. Namun sarana dan prasarana pendukung belum dimiliki Dinas Sosial saat

melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar seperti peralatan melatih keterampilan, gedung khusus untuk anak, dan sebagainya.

4. Partisipasi Masyarakat

Keberadaan anak terlantar di Kota Pekanbaru cukup memprihatinkan, sehingga banyak terlihat anak terlantar di beberapa sudut kota seperti perempatan atau pertigaan rambu-rambu lalu lintas. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan keberadaan anak terlantar menjadikan kondisi anak terlantar semakin jauh dari kata layak, sehingga anak terlantar tidak mendapat perhatian. Sementara penjangkaun dari Dinas Sosial masih terbatas, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan atas keberadaan anak terlantar. Selain itu Anak terlantar di Kota Pekanbaru sebagian dari mereka ada yang memiliki keluarga, namun kurangnya perhatian keluarga menyebabkan anak terlantar hidup di jalanan dan tidak memperoleh kehidupan yang layak.

Kesimpulan

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berjalan. Hasil ini diperoleh dari 2 indikator penelitian yang ditetapkan yakni: Indikator proses pelaksanaan program ditemukan bahwa kegiatan perlindungan dan jaminan sosial rutin dan konsisten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak terlantar yang ada. Namun tidak semua dari sub kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya, seperti kegiatan penjangkauan, pemeliharaan, dan pengawasan hanya kegiatan pemeliharaan yang dapat rutin dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan penjangkauan dilakukan oleh tenaga penyuluh, sukarelawan, dan sebagainya belum berjalan maksimal yang menyebabkan belum ada data pasti jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru. Kemudian kegiatan pengawasan hanya rutin dilakukan pada saat razia, sedangkan pada waktu lainnya Dinas Sosial hanya menunggu laporan dari tenaga penyuluh, sukarelawan, atau masyarakat mengenai anak terlantar.

Indikator tujuan kebijakan ditemukan dalam melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial sudah terlaksana sebagaimana diharapkan oleh Dinas Sosial, sehingga anak terlantar yang ditargetkan dan memperoleh program ini mendapatkan perubahan baik moral, sosial, dan spiritual. Kemudian pada masa mendatang anak-anak terlantar mendapat hak hidup yang layak sebagaimana mestinya. Namun dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar hanya sebatas rehabilitasi dalam beberapa hari dan kemudian dikembalikan ke lingkungan atau keluarganya, sehingga perlindungan dan jaminan sosial tidak banyak mengubah kehidupan anak terlantar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hambatan dalam pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM terlatih dan kompeten, kurangnya fasilitas dan sarana pelatiah, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat. Kesemua hambatan ini menjadi satu kesatuan, sehingga program perlindungan dan jaminan sosial anak terlantar

belum mampu menjangkau semua anak dan menghilangkan anak terlantar dari Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka**Buku-buku:**

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Adisasmita, Rahardjo 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu:Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, Hanifah. 2012. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat

- Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.

- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAURATION IN RIAU PROVINCE. In ICSScE 2018.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan

- Perdagangan Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 9(2), 88-99. Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 7(1), 1-9. Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(1), 120-126. Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration

- Service Model "Patent"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD: "Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan

- Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS

- OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017).

- Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.

- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota
Pekanbaru